

## Surakarta dalam Arus Pergerakan Nasional Indonesia: Peran Elite Keraton dan Masyarakat

**Arinal Haq M**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
[ahaq5062@gmail.com](mailto:ahaq5062@gmail.com)

**Imam Ibnu Hajar**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
[ibnuhajar@uinsa.ac.id](mailto:ibnuhajar@uinsa.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas posisi dan peran Surakarta dalam dinamika Pergerakan Nasional Indonesia pada kurun 1908–1945 M dengan menitikberatkan pada kontribusi elite Keraton Surakarta dan partisipasi masyarakat. Menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sosio-historis serta kerangka teori nasionalisme Benedict Anderson, penelitian ini menempatkan Surakarta sebagai ruang strategis tempat bertemunya kekuasaan tradisional, organisasi modern, dan dinamika sosial perkotaan dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surakarta memiliki kedudukan penting sebagai simpul politik, ekonomi, dan kultural yang memungkinkan transmisi gagasan nasionalisme melalui jaringan transportasi, pers, pendidikan, dan organisasi sosial-keagamaan. Elite Keraton Surakarta berperan sebagai penyedia modal kultural dan legitimasi simbolik bagi pergerakan nasional, sebagaimana tercermin dalam dukungan Pakubuwono X terhadap organisasi modern serta peran Radjiman Wedyodiningrat dalam perumusan dasar negara melalui BPUPKI. Di sisi lain, organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Taman Siswa berfungsi sebagai wadah sosialisasi ide-ide kebangsaan di kalangan masyarakat Surakarta. Penelitian ini menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak semata-mata lahir dari wacana politik modern, tetapi juga dari integrasi tradisi lokal dan interaksi kolektif antara elite dan masyarakat akar rumput. Dengan demikian, Surakarta menjadi salah satu lokus penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia.

**Kata Kunci:** *Surakarta, Pergerakan Nasional, Elite Keraton, Nasionalisme.*

### PENDAHULUAN

Surakarta pada awal abad ke-20 M menduduki posisi strategis sebagai salah satu pusat dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Jawa yang turut membentuk wajah pergerakan nasional Indonesia. Kota ini tidak hanya menjadi simpul penting jaringan transportasi dan perdagangan, tetapi juga ruang pertemuan berbagai kekuatan sosial: kekuasaan tradisional keraton, kaum priyayi modern, pedagang, ulama, kaum buruh, hingga pelajar (Marwati, 2019: 334). Di tengah menguatnya kolonialisme Belanda dan munculnya gagasan-gagasan baru tentang kebangsaan, Surakarta menjelma sebagai salah satu “laboratorium” tempat ide nasionalisme, modernisasi, dan resistensi kolonial diuji

dan dinegosiasikan melalui beragam medium, mulai dari organisasi politik, gerakan keagamaan, dunia pendidikan, hingga praktik budaya sehari-hari (Mahamid, 2025).

Jika ditelisik dari kacamata historiografi nasional, sejumlah kajian mengenai pergerakan nasional Indonesia telah mengulas peran kota-kota besar seperti Batavia, Bandung, dan Yogyakarta, sementara kajian mendalam mengenai Surakarta sering muncul secara fragmentaris dalam pembahasan Sarekat Islam, Muhammadiyah, atau biografi tokoh tertentu. Ada juga penelitian yang menyoroti aspek-aspek tertentu dari peran keraton atau organisasi Islam di Surakarta, namun belum banyak yang secara khusus mencakup kajian tentang posisi kota, peran elite keraton, dan dinamika dalam satu kerangka analisis yang utuh. Di sinilah letak keberadaan penelitian ini: berupaya mengisi celah dengan memusatkan perhatian pada Surakarta sebagai satuan analisis yang memadukan dimensi kekuasaan tradisional dan gerakan masyarakat dalam arus pergerakan nasional 1908–1945 M (Mahamid & Hidayatulloh, 2024).

Dalam konteks tersebut, peran dan kehadiran elite Keraton Surakarta baik di Kasunanan Surakarta maupun Kadipaten Mangkunegaran memiliki arti penting. Raja dan elite keraton tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan tradisional, tetapi juga sebagai aktor politik dan kultural yang berhadapan langsung dengan kebijakan kolonial serta geliat organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam (SDI). Sikap, kebijakan, serta strategi politik dan simbolik yang diambil elite keraton, misalnya pemberian dukungan kultural, izin penggunaan ruang, atau justru sikap kompromistis terhadap pemerintah kolonial memberikan pengaruh besar terhadap arah perkembangan pergerakan nasional di Surakarta. Di saat yang sama, keraton juga memegang peran sebagai pusat produksi simbol dan legitimasi, sehingga keterlibatannya dalam wacana kebangsaan ikut mempengaruhi bagaimana identitas nasional dinegosiasikan di tingkat lokal.

Elemen Keraton, dengan segala ritual, narasi sejarah, dan simbol-simbol kekuasaannya, menyediakan modal kultural yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat atau justru meredam semangat kebangsaan. Dukungan atau persetujuan elit keraton terhadap organisasi-organisasi pergerakan, misalnya, tidak hanya berdampak secara politik, tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi gerakan tersebut. Oleh karena itu, menelaah posisi dan tindakan elit Keraton Surakarta dalam periode 1908–1945 M menjadi kunci untuk memahami bagaimana kekuasaan tradisional beradaptasi, bernegosiasi, dan terlibat dalam proses lahirnya identitas nasional Indonesia (Susanto, 2017:12).

Di luar tembok keraton, masyarakat Surakarta menunjukkan dinamika yang tidak kalah penting. Kelompok priyayi rendahan, pedagang batik, kaum buruh perkotaan, santri, dan pelajar menjadi basis sosial yang aktif dalam menyerap dan menyebarkan ide-ide kebangsaan melalui organisasi sosial-keagamaan dan lembaga pendidikan modern. Kemunculan dan perkembangan organisasi seperti Sarekat Dagang Islam/Sarekat Islam, Muhammadiyah cabang Surakarta, sekolah-sekolah modern, dan berbagai perkumpulan kedaerahan maupun profesi menjadi saluran penting sosialisasi gagasan emansipasi, keadilan, dan nasionalisme. Interaksi antara wacana keagamaan, kepentingan ekonomi,

dan aspirasi politik dalam organisasi-organisasi ini membentuk corak khas pergerakan di Surakarta yang sering dipandang lebih radikal dan dinamis dibandingkan beberapa wilayah lain.

Aktivitas masyarakat ini mencerminkan pergeseran kekuatan sosial ke arah kemandirian, yang mulai menjauh dari pola hubungan patron-klien (timbang balik) tradisional dengan keraton. Kemandirian organisasional, kepemimpinan lokal, serta jaringan yang melintasi batas etnis, kelas, dan wilayah menjadikan Surakarta sebagai salah satu simpul penting dalam jejaring pergerakan nasional di Jawa. Dengan demikian, kajian mengenai peran masyarakat Surakarta tidak hanya menggambarkan partisipasi lokal semata, tetapi juga membuka pemahaman tentang bagaimana gagasan nasionalisme diterjemahkan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan di tingkat akar rumput (Lamia, 2023: 47).

Pola relasi kekuasaan di Surakarta kurun 1908–1945 mencerminkan kompleksitas sosial yang tinggi, di mana aliansi antara pihak keraton dan masyarakat kerap kali berdampingan dengan sikap kritis dan oposisi. Di satu sisi, sebagian elit keraton berupaya mempertahankan legitimasi tradisional dengan beradaptasi terhadap modernitas dan pergerakan nasional. Di sisi lain, muncul kekuatan-kekuatan sosial baru yang tidak sepenuhnya bergantung pada otoritas tradisional, melainkan pada jaringan organisasi modern, pers, dan lembaga pendidikan. Situasi ini menyebabkan ruang Surakarta dipenuhi negosiasi makna tentang “bangsa”, “kedaulatan”, dan “kemerdekaan”, yang tercermin dalam kebijakan keraton, gerakan organisasi rakyat, serta praktik budaya dan keagamaan di lingkungan masyarakat (Suci, 2010: 87).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji melalui pendekatan sosio-historis digunakan untuk menelisik posisi Surakarta dalam arus pergerakan nasional Indonesia pada kurun 1908–1945 M dengan fokus pada kalangan elit keraton dan masyarakat. Pokok persoalan yang akan diangkat pada topik ini adalah; (1) Bagaimana kedudukan dan peran Surakarta dalam dinamika pergerakan nasional Indonesia, (2) Apa saja kontribusi pemikiran, jaringan, dan simbolik elit Keraton Surakarta terhadap penguatan identitas pada Masa Pergerakan Nasional, (3) Serta bagaimana organisasi-organisasi sosial, keagamaan, dan pendidikan di Surakarta menjadi wadah sosialisasi ide-ide kebangsaan di kalangan masyarakat.

Pada penelitian ini, teori yang akan dipakai sebagai landasan konseptual adalah Teori Nasionalisme, yang dicetuskan oleh Benedict Anderson (Intan, 2001:37). Penggunaan teori nasionalisme Anderson ini memungkinkan peneliti dalam mengkaji dan mengupas data-data tentang bagaimana praktik simbolik keraton, aktivitas organisasi sosial-keagamaan, dan dinamika pendidikan di Surakarta ikut membentuk cara orang membayangkan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang lebih luas. Media cetak lokal, pidato, rapat-rapat organisasi, ritual keraton, hingga jejaring ulama dan pedagang dapat diartikan sebagai media yang menghubungkan pengalaman lokal Surakarta dengan wacana nasional yang sedang tumbuh. Melalui kacamata tersebut, peran elit keraton dan masyarakat tidak hanya dilihat pada tataran politik praktis, tetapi juga sebagai produsen

dan konsumen simbol-simbol yang mengisi imajinasi tentang komunitas nasional yang baru.

Dengan demikian, mengangkat topik ini tidak hanya dalam rangka merekonstruksi sejarah lokal Surakarta, tetapi juga penting menjelaskan secara mendalam karakter khas pergerakan di Surakarta sekaligus menampilkan kontribusi kota ini dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Penekanan pada topik ini diharapkan memberikan signifikansi teoritis bagi pengayaan kajian sejarah lokal dan nasionalisme, serta signifikansi praktis dalam memahami bagaimana hubungan antara elite dan akar rumput membentuk konfigurasi politik dan kultural Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris bagi pemahaman tentang bagaimana identitas nasional terbentuk dari interaksi antara pusat dan daerah, antara elite dan akar rumput, dalam rentang waktu krusial menjelang dan menjelang tercapainya kemerdekaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan surakarta sebagai ruang strategis politik dan ekonomi dalam kancah pergerakan nasional**

#### *Posisi geografis dan jaringan transportasi surakarta*

Surakarta terletak di jalur tengah Jawa yang menghubungkan pantai utara, pedalaman, dan wilayah timur. Posisi ini menjadikannya titik henti penting bagi pergerakan manusia, barang, dan berita. Kota ini bukan hanya pusat kerajaan, tapi juga simpul perdagangan kolonial yang banyak melibatkan pribumi, Tionghoa, dan Eropa. Stasiun kereta dan terminal menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok sosial yang saling bertukar cerita dan wacana dari kota lain. Mobilitas tinggi ini mempercepat penyebaran ide nasionalisme dan kritik kolonial.

Pembangunan jalur kereta api oleh pemerintah kolonial yang menghubungkan Surakarta dengan Semarang, Yogyakarta, dan Madiun memperkuat peran kota ini sebagai simpul transportasi yang strategis. Kereta api tidak hanya mengangkut komoditas seperti beras, gula, dan batik, tetapi juga menghubungkan para pelajar, pegawai, aktivis organisasi, dan tokoh agama yang berpindah dari satu kota ke kota lain. Di dalam gerbong-gerbong kereta dan di ruang tunggu stasiun, terjadi pertukaran cerita tentang kebijakan kolonial, ketidakadilan ekonomi, dan gerakan baru yang muncul di Batavia, Bandung, atau Yogyakarta. Rangkaian pengalaman ini secara perlahan menanamkan kesadaran bahwa permasalahan yang dihadapi penduduk Surakarta serupa dengan yang dialami penduduk daerah lain (Imam, 2023:36).

Dalam teori Nasionalisme Benedict Anderson, jaringan transportasi ini menjadi syarat material “komunitas terbayang”. Orang yang tak saling kenal merasa terhubung lewat pengalaman sama. Penduduk Surakarta yang bepergian atau membaca koran dari luar mulai sadar berbagi nasib dengan rakyat Jawa lain. Mobilitas ini mengalihkan kesetiaan lokal ke rasa kebersamaan nasional, di mana kereta dan jalan menghubungkan imajinasi politik.

Surakarta juga menjadi simpul penting dalam jaringan pos dan distribusi surat kabar. Koran-koran yang terbit di kota-kota besar lain dapat masuk dan beredar di Surakarta, sementara media lokal ikut menyuarakan isu-isu pergerakan dan kritik sosial yang sedang berkembang. Kehadiran kantor-kantor pos dan agen koran di sekitar pasar, stasiun, dan pusat kota memudahkan kalangan terdidik, pengusaha, dan anggota organisasi untuk mengikuti perkembangan politik di tingkat regional maupun nasional.

Keberadaan Surakarta sebagai simpul transportasi dan komunikasi ini akhirnya membentuk karakter kota sebagai ruang pergerakan yang dinamis. Perkumpulan-perkumpulan politik, sosial, dan keagamaan memanfaatkan kemudahan akses tersebut untuk mengundang pembicara dari luar kota, menyebarkan pamflet, dan menjalin jaringan organisasi lintas daerah (Haikal, 2022:102). Pertemuan-pertemuan yang berlangsung di Surakarta seringkali memiliki gema yang meluas ke kota lain, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, posisi geografis dan jaringan transportasi Surakarta bukan sekadar latar belakang statistik, melainkan faktor aktif yang mendorong terbentuknya kesadaran kebangsaan dalam bingkai komunitas terbayang Indonesia.

#### *Struktur ekonomi perdagangan, industri batik, dan kelas menengah baru*

Struktur ekonomi Surakarta pada awal abad ke-20 ditopang secara kuat oleh kegiatan perdagangan dan industri batik di kampung Laweyan dan Kauman. Pengusaha batik pribumi menjalankan produksi yang melibatkan perajin, buruh, dan pedagang. Mereka menjual ke pasar lokal-regional, menciptakan modal besar di kalangan pribumi. Kelompok saudagar ini mandiri secara ekonomi, lebih kuat dari petani atau buruh. Dari sini muncul tokoh yang mendukung organisasi modern dan pergerakan nasional.

Industri batik mendorong kelas menengah baru dengan gaya hidup dan jaringan berbeda dari keraton atau rakyat kecil. Mereka sering bepergian dagang, mengakses pendidikan dan koran. Kelompok ini membaca berita politik, hubungi pengusaha luar kota. Mereka menjadi basis Sarekat Dagang Islam dengan H. Samanhoei sebagai pencetusnya menciptakan tujuan melindungi pedagang pribumi dari diskriminasi, lalu kemudian oleh H.O.S Tjokroaminoto berkembang menjadi organisasi politik nasional (Lutfiah, 2020:106).

Dalam teori Benedict Anderson, batik kelas menengah menjadi perantara wacana nasionalisme ke masyarakat. Mereka membeli koran rutin, organisasi donasi, adakan pertemuan di rumah saudagar. Di situ diskusikan keadilan, persamaan, dan "bangsa Indonesia". Ide ini tersebar melalui kaum buruh dan jaringan sosial luas, bentuk komunitas terbayang.

Disamping itu, ekonomi batik memberi peran perempuan sebagai pengusaha utama di kampung batik. Mereka mengelola produksi dan keuangan, mengakses jaringan sosial yang lebih luas. meskipun bentuk partisipasi mereka dalam pergerakan seringkali tidak tercatat secara eksplisit dalam sumber-sumber resmi. Meski demikian, posisi perempuan pengusaha batik sebagai bagian dari kelas menengah memenuhi struktur sosial dan memperluas landasan pendukung bagi wacana pembaharuan dan nasionalisme (Nabila, 2025:126).

Bisa ditarik garis bawah, bahwa struktur ekonomi Surakarta bukan hanya produksi batik, tapi lahirkan kelas sosial aktif membayangkan bangsa Indonesia. Kelas menengah beri landasan materi dan sosial bagi pergerakan, menghubungkan pengalaman lokal dengan imajinasi nasional melalui dagang, koran, dan rapat.

#### *Struktur sosial dan konfigurasi kelas di surakarta*

Struktur sosial Surakarta awal abad ke-20 berpusat di keraton yang melindungi priyayi istana dan birokrat luar, dikelilingi saudagar, ulama, guru, pekerja terampil, buruh pabrik, tukang, dan petani di kampung kota-pinggiran. Setiap kelas punya peran dan pandangan sendiri soal kolonialisme dan perubahan, hal ini menjadikan kota Surakarta berlapis dinamis. Priyayi terdidik Barat/modern memunculkan kaum intelektual yang berjiwa nasionalisme, gemar membaca koran Belanda-Melayu, dan turut berkontribusi dalam politik global, serta bergabung dengan organisasi nasional. Begitu pula dengan kalangan Ulama-santri di pesantren-madrasah gencar membahas keadilan, penjajahan, solidaritas umat, gabung wacana agama-kebangsaan ciptakan identitas Islam-Indonesia baru.

Selain itu, para saudagar batik-pedagang merasakan pajak tinggi, saingan dagang dan diskriminasi kolonial, mereka turut mendukung organisasi pergerakan nasional bahkan beberapa diantaranya menjadi motor pergerakannya. Hal ini tidak lepas dari kesadaran kaum buruh-pekerja yang mengalami eksploitasi, tekanan tersebut kemudian menciptakan ide reformasi, perkumpulan rapat-demo menjadikan refleksi kesadaran lapisan bawah. Simbol keraton baru juga turut menunjukkan dengan adanya kesamaan misi “bangsa Indonesia” mereka dapat berdampingan bersama dengan buruh yang memiliki kesamaan nasib tertindas dan kesamaan visi yaitu “merdeka”. Struktur berlapis menghasilkan medan pergerakan yang panas akan semangat gelora merdeka. Dari awalnya persekutuan-ketegangan priyayi, saudagar, ulama, rakyat kini bertransformasi menjadi pergerakan nasional dengan menghidupkan politik kolonial-organisasi. Dengan begitu nasionalisme melahirkan interaksi antar-kelas, kota Surakarta contoh bahwa komunitas terbayang Indonesia melalui jaringan sosial majemuk (Kuntowijoyo, 2003:51).

#### **Kontribusi pemikiran, jaringan, dan simbolik elite keraton surakarta terhadap penguatan identitas nasional indonesia.**

Keraton sering diasumsikan sebagai lambang tradisi yang tersisih dari modernisasi politik. Namun, elite keraton Surakarta memiliki peran krusial dalam penyampaian konsep mengenai bangsa yang memadukan nilai-nilai kebudayaan Jawa dengan keinginan untuk modernisasi politik. Secara tidak langsung elite keraton Surakarta menepis stigma mengenai tersisihnya keraton dalam modernisasi politik dengan menjadikan keraton sebagai wadah perjumpaan antara tradisi Jawa dengan modernisasi kebangsaan yang mulai muncul pada awal abad ke-20.

Elite keraton Surakarta tidak hanya berperan sebagai pelindung tradisi, namun juga menjadi roda penggerak penyebaran ide-ide kebangsaan yang berdasar pada nilai-

nilai lokal. Hal ini terbukti dengan peranan Sri Susuhunan Pakubuwono X, yang dikenal sebagai raja yang inovatif pada aspek pendidikan dan sosial-politik. Sebagai bentuk kontribusinya Pakubuwono X memberikan sokongan baik secara moral maupun material kepada kelompok pergerakan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam di Surakarta, yang turut menjadi wadah dalam ranah sosial politik dalam pembentukan gagasan nasionalisme pada awal abad ke-XX (Antara News, 2009).

Dukungan yang diberikan oleh Pakubuwono X, tidak serta merta dilakukan secara terbuka, namun sering bersifat simbolik dan informal. Hal tersebut dilakukan dengan dasar mempertahankan posisi keraton di bawah pengawasan pihak Belanda, namun tetap dapat berkontribusi dengan perkembangan nasionalisme. Sejarawan menyampaikan bahwa Pakubuwono X secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi memberikan sokongan kepada perkumpulan-perkumpulan politik pada abad 20. Secara tidak langsung hal tersebut mencerminkan kontribusi yang diberikan oleh Pakubuwono X terhadap penguatan gerakan nasional Indonesia.

Selain Pakubuwono X, priyayi terdidik dari keraton Surakarta juga andil dalam mewujudkan pembentukan gagasan nasionalisme. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) Radjiman Wedyodiningrat merupakan tokoh sentral, seorang dokter lulusan STOVIA, abdi dalem keraton sekaligus nasionalis yang pada kemudian hari menjadi Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Radjiman mampu merepresentasikan dirinya yang merupakan elite keraton yang mampu menjadi jembatan antara tradisi Jawa dengan politik modern.

Radjiman Wedyodiningrat menjadi salah satu elite keraton yang memiliki andil dalam pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari awal abad ke-20 ia berkecimpung dalam organisasi Budi Utomo dan pernah menduduki posisi strategis yaitu Ketua Pengurus Besar Budi Utomo pada tahun 1914 - 1915, dibawah tonggak kepemimpinannya, Radjiman memberikan usulan terhadap pemerintah Belanda mengenai perlu adanya pembentukan pasukan rakyat diberbagai daerah di Indonesia sebagai langkah menghadapi Perang Dunia I. Namun, ide tersebut kalah populer dibandingkan dengan ide mengenai pentingnya suatu wadah yang bisa mewakili suara rakyat (Hendrus, 2017: 44).

Radjiman memiliki pemikiran bahwa bagaimana mungkin bisa mempertahankan negara ini bersama Belanda, jika tidak ada “wakil” dari kalangan pribumi. Karena hal itu, Budi Utomo memulai pembentukan komite “*Indie Weerbaar*” ke Belanda, Budi Utomo diwakili oleh Dwidjosewojo. Pada misi tersebut didapat hasil yang memuaskan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Belanda Menyetujui pembentukan Undang-undang mengenai *Volksraad*,<sup>1</sup> yang disetujui pada Desember 1916. Hal tersebut menjadi pencapaian Budi Utomo sebagai organisasi yang bersikap kooperatif terhadap pemerintahan Belanda. Konsistensi Radjiman dalam organisasi tersebut mengantarkannya pada keanggotaan *Volksraad* setelah lembaga itu didirikan. Di luar itu, ia juga berperan aktif dalam *Committee van de Javasche Ontwikkeling* (Java Instituut) serta *Indonesische Studie Club*, yang menjadi wadah diskusi intelektual pada masa itu. Dari basis sosial-budaya

---

<sup>1</sup> *Volksraad* yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda.

Surakarta, Radjiman tampil sebagai priyayi intelektual yang memperjuangkan kemajuan melalui jalur pendidikan, organisasi dan diplomasi politik (Hendrus, 2017: 44).

Para elite keraton turut mengikutsertakan wanita dari kalangan aristokrat, sebagaimana tercermin dalam organisasi Putri Narpawandawa. Organisasi ini memiliki peranan sebagai wadah tempat para perempuan keraton melaksanakan kegiatan sosial dan budaya, yang secara tidak langsung berperan sebagai jembatan pendukung gerakan nasional. Keikutsertaan wanita kalangan elite keraton menandakan bahwa keraton memiliki sumbangsih terhadap nasionalisme yang kolektif dan tidak hanya sebatas dominasi sosok sultan atau bangsawan pria saja (Liputan 68, 2017).

Dalam perkembangan nasionalisme Indonesia, simbol-simbol budaya keraton memainkan peran penting sebagai modal kultural yang memperkaya identitas kebangsaan. Nasionalisme Indonesia tidak lahir semata dari wacana politik modern, tetapi juga dari pengakuan terhadap tradisi lokal sebagai elemen kepribadian bangsa. Keraton Surakarta dalam konteks ini menjadi sumber fondasi historis dan kultural bagi pembentukan bangsa Indonesia yang plural dan berakar pada kebudayaan.

Peran elite Keraton Surakarta mencapai signifikansi penting dalam proses perumusan dasar negara. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua mengajukan pertanyaan fundamental mengenai dasar negara Indonesia. Pertanyaan ini menjadi pemicu lahirnya perdebatan ideologis yang bermuara pada perumusan Pancasila. Dalam konteks ini, peran Radjiman bersifat substantif karena memastikan bahwa dasar negara tetap berakar pada nilai-nilai kepribadian bangsa.

Secara keseluruhan, kontribusi elite keraton Surakarta terhadap penguatan identitas nasional Indonesia terwujud melalui pemikiran kebangsaan, jaringan sosial-politik, dan simbolik budaya. Keraton tidak memimpin revolusi secara radikal, tetapi menawarkan jalur kultural dan intelektual yang memperkuat fondasi ideologis nasionalisme Indonesia. Melalui “jalan sunyi” inilah, elite keraton menjadi bagian integral dari proses pembentukan identitas nasional Indonesia (Hendrus, 2017: 46).

### **Organisasi-organisasi sosial, keagamaan dan pendidikan di surakarta menjadi wadah sosialisasi ide-ide kebangsaan di kalangan masyarakat**

Organisasi-organisasi sosial, keagamaan, dan pendidikan di Surakarta pada awal abad ke-20 memainkan peran krusial sebagai wadah sosialisasi ide-ide kebangsaan di kalangan masyarakat. Berbasis pada latar belakang kolonial Belanda yang mendiskriminasi pribumi, organisasi-organisasi ini tidak hanya memperjuangkan kemajuan ekonomi, pendidikan, dan agama, tetapi juga membangun kesadaran nasional melalui diskusi, kongres, dan aksi massa. Surakarta, sebagai pusat keraton dan perdagangan, menjadi inkubator pergerakan nasional berkat dukungan elit lokal.

#### *Organisasi sosial: boedi oetomo*

Lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menandai fase awal pergerakan nasional Indonesia yang berbasis kesadaran intelektual dan pendidikan. Organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh-tokoh terpelajar seperti dr. Wahidin Sudirohusodo, R.

Soetomo, dan M. Soeradji. Melalui gagasan *studifonds* dan aktivitas pers seperti *Retnodhoemilah*, dr. Wahidin mendorong kesadaran masyarakat Jawa akan pentingnya pendidikan sebagai sarana kemajuan bangsa. Pertemuan gagasan tersebut dengan para pelajar STOVIA memicu pembentukan organisasi modern yang memiliki struktur kepengurusan, tujuan, serta aturan tertulis (AD/ART). Keanggotaan Budi Utomo yang melibatkan pelajar dari berbagai sekolah di Jawa menunjukkan tumbuhnya jejaring intelektual lintas daerah yang menjadi fondasi awal kesadaran kebangsaan.

Pada fase awal, Budi Utomo lebih menitikberatkan perjuangan pada bidang sosial-budaya, khususnya pendidikan, dan bersifat moderat serta non-politik. Sikap ini dipengaruhi oleh konteks kolonial yang membatasi aktivitas politik pribumi melalui regulasi seperti *Regeering Reglement*. Meski sempat menuai kritik internal, termasuk dari dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Budi Utomo tetap konsisten pada strategi gradual dalam mencerdaskan bangsa. Perubahan orientasi terjadi pada awal 1920-an ketika organisasi mulai terlibat dalam arena politik guna memperjuangkan representasi pribumi dalam lembaga-lembaga kolonial. Puncaknya, fusi dengan Persatuan Bangsa Indonesia pada 1935 melahirkan Partai Indonesia Raya (Parindra), yang menandai transformasi Budi Utomo dari organisasi kultural-edukatif menjadi bagian penting dalam dinamika politik nasional. Peran historis Budi Utomo terletak pada keberhasilannya membentuk pola pikir kritis, kesadaran kolektif, dan basis intelektual bagi tumbuhnya nasionalisme Indonesia (Ichsan, 2023: 101-105).

#### *Sarekat islam: ekonomi dan solidaritas massa*

Sarekat Islam (SI) yang berakar dari Sarekat Dagang Islam (SDI) dan didirikan di Surakarta pada 1911 oleh H. Samanhudi merupakan contoh penting organisasi sosial-keagamaan yang berfungsi sebagai wahana sosialisasi nasionalisme pada awal abad ke-20. Berangkat dari kepentingan ekonomi pedagang pribumi batik yang terdesak oleh dominasi pedagang Cina dan kebijakan kolonial, SDI berkembang menjadi SI dengan orientasi politik yang lebih luas. Transformasi ini menandai pergeseran kesadaran kolektif masyarakat Muslim Surakarta dari solidaritas ekonomi menuju perjuangan kebangsaan, dengan Islam dijadikan landasan moral dan ideologis untuk melawan ketidakadilan kolonial.

Sebagai organisasi massa terbuka, SI memiliki daya jangkauan luas yang melampaui batas sosial dan geografis. Melalui rapat umum, kongres nasional, jaringan cabang, serta penggunaan simbol dan bahasa Islam, SI berhasil menanamkan gagasan persamaan derajat, solidaritas umat, dan kesadaran sebagai bangsa terjajah. Di Surakarta, SI tidak hanya menjadi alat mobilisasi politik, tetapi juga ruang pendidikan politik rakyat, tempat masyarakat belajar tentang hak, keadilan, dan partisipasi publik. Dengan demikian, SI berperan sebagai institusi perantara yang mentransmisikan nasionalisme modern ke dalam struktur sosial-keagamaan lokal.

Meskipun menghadapi tantangan internal berupa konflik ideologi dan infiltrasi komunisme, Sarekat Islam tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan nasionalisme Indonesia. Program-program SI di bidang politik, pendidikan, keadilan, dan ekonomi menunjukkan bahwa nasionalisme tidak hanya disosialisasikan

melalui wacana politik, tetapi juga melalui praktik sosial yang membela kepentingan rakyat. Dalam konteks Surakarta, keberadaan SI memperlihatkan bagaimana organisasi sosial-keagamaan mampu menjadi wadah efektif penyebaran ide-ide kebangsaan yang berakar pada nilai agama, pengalaman sosial, dan kesadaran kolektif masyarakat pribumi (Usman, 2017:51).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Surakarta pada kurun 1908–1945 M menempati posisi strategis dalam dinamika Pergerakan Nasional Indonesia. Kedudukan geografis, jaringan transportasi, dan struktur ekonomi berbasis perdagangan serta industri batik menjadikan Surakarta sebagai ruang pertemuan berbagai kelompok sosial dan sebagai simpul penting dalam penyebaran ide-ide kebangsaan. Mobilitas manusia, barang, dan informasi yang tinggi memungkinkan terbentuknya kesadaran kolektif yang melampaui batas lokal menuju imajinasi nasional sebagaimana dijelaskan dalam teori “komunitas terbayang” Benedict Anderson.

Elite Keraton Surakarta memainkan peran signifikan dalam proses tersebut. Keraton tidak semata berfungsi sebagai simbol kekuasaan tradisional, tetapi juga sebagai produsen modal kultural dan legitimasi politik. Dukungan simbolik dan strategis dari Pakubuwono X terhadap organisasi-organisasi pergerakan, serta peran intelektual dan politik Radjiman Wedyodiningrat, menunjukkan bahwa elite keraton berkontribusi secara substantif dalam penguatan nasionalisme Indonesia. Puncak kontribusi ini tampak dalam keterlibatan Radjiman dalam BPUPKI, khususnya dalam mendorong perdebatan mengenai dasar negara yang berujung pada perumusan Pancasila.

Di luar tembok keraton, dinamika masyarakat Surakarta memperlihatkan partisipasi aktif kelompok priyayi modern, saudagar batik, ulama, pelajar, buruh, serta perempuan dalam organisasi sosial, keagamaan, dan pendidikan. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Taman Siswa berfungsi sebagai arena sosialisasi ide-ide kebangsaan, tempat nilai emansipasi, keadilan, dan solidaritas nasional disebarluaskan dan dipraktikkan. Interaksi antara elite dan masyarakat, antara tradisi dan modernitas, membentuk corak pergerakan nasional Surakarta yang dinamis, plural, dan berlapis.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi Surakarta dalam pembentukan identitas nasional Indonesia bersifat kolektif dan multidimensional. Nasionalisme Indonesia tidak lahir secara homogen dari pusat kekuasaan kolonial atau elite modern semata, melainkan dari proses negosiasi yang melibatkan kekuasaan tradisional, organisasi modern, dan masyarakat akar rumput. Surakarta menjadi contoh penting bagaimana identitas nasional Indonesia dibangun melalui interaksi antara pusat dan daerah, antara elite dan rakyat, dalam konteks sejarah menuju kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. *"Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang"*. Diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2001.

- ANTARA News, *Pakubuwono X di Balik Pergerakan Nasional*, <https://www.antaranews.com/berita/141196/paku-buwono-x-dibalik-pergerakan-nasional>.
- Daman, Mansyur dan Hendrus. “Dr. KRT Radjiman Wediodiningrat: dokter pejuang.” Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta. 2017.
- Haikal Elbaita A. dkk. ”Pembangunan Transportasi Kereta Api dan Pengaruhnya Terhadap Ekologi Kota Surakarta (1864-1942)”, *Jurnal Candi Volume 22. No.1*. 2022.
- Imam Nawawi, "Perlawanan Elite Keraton dan Elite Keagamaan Terhadap Kolonial di Surakarta Pada Abad 19" *Skripsi, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2023. Hal 36.
- Ismail Usman, “Sarekat Islam (SI) Gerakan Politik Pembaruan Politik Islam”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam Vol. 21, No.1*, 2017.
- Kuntowijoyo. "Lari Dari Kenyataan: Raja, Priyayi, dan Wong Cilik Biasa di Kasunanan Surakarta 1900-1905" *Jurnal Humaniora Volume XV, No. 2*. 2003.
- Lamia Rozziana P. "Mangkunegaran VIII: Sikap Dalam Revolusi Sosial Tahun 1945-1946" *Jurnal jejak Vol. 3 No. 2*, 2023.
- Liputan68, *Sejarah Organisasi Putri Narpa Wandawa Keraton Surakarta*, <https://www.liputan68.com/2021/06/11/sejarah-organisasi-wanita-keraton-surakarta/>.
- Lutfiah H. Anis F. Z. "Memperkenalkan Sejarah Pahlawan Nasional K.H. Samanhudi bagi Peserta Didik MI/SD di Indonesia" *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education Vol. 3, No. 2*, 2020.
- Mahamid, M. N. L. & Hidayatulloh, H. (2024). “Exploring Wahdatul Wujud in Javanese Palace Manuscripts: A Comparative Study of Serat Menak and Serat Wedhatama.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 22(1), 287–316. <https://jlka.kemenag.go.id/lektur/id/article/view/1150>
- Mahamid, M. N. L. (2025). “Wahdat Al-Wujud in Serat Wedhatama: Historical Roots, Javanese Contextualization, and Ontological Representation.” *Proceeding of International Conference on Cultures & Languages* 3(1), 203–214. <https://conferences.uinsaid.ac.id/iccl/paper/view/400>
- Marwati Djoened. P. "*Sejarah Nasional Indonesia*" jil. V, cet.7. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Muhammad Ichsan, dkk, “Budi Utomo: Pemantik Pergerakan Nasional”, *Edu Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FISIP Universitas Jambi Vol. 2 No. 1 April* 2023.
- Nabila A. dkk. "Mbok Mase dan Peran Perempuan Priyayi dalam Industri Batik Laweyan Surakarta Pada Masa Kolonial, 1900-1970" *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities Vol. 06 No. 02*. 2025.
- Qomarun, Budi P. “Morfologi Kota Solo (tahun 1500-2000)” *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 35, No. 1*, Juli 2007.

- Suci Nur A. Z, Nurhayati H. S. A. "Surakarta: Perkembangan Kota Sebagai Akibat Pengaruh Perubahan Sosial Pada Bekas Ibukota Kerajaan di Jawa". *Jurnal Lanskap Indonesia* Vol 2. No. 2. 2010.
- Susanto, "Nuansa Kota Kolonial Surakarta Awal Abad XX: Fase Hilangnya Identitas Lokal" *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2 , No. 1, 2017.